

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana merupakan serangkaian dari suatu peristiwa yang berasal dari faktor alam atau faktor dari tindakan manusia sekitar yang dapat merugikan manusia tersebut¹. Peristiwa ini sering kali terjadi dengan cara tidak terduga dan tiba-tiba yang dapat mengakibatkan kerugian baik dari material dan juga menyebabkan adanya korban jiwa. Menurut Undang-Undang NO 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis². Bencana alam merupakan suatu kejadian yang berbahaya yang dapat terjadi kapan saja serta menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Bencana alam yang terjadi menyebabkan dampak kerugian dan kerusakan kondisi di sekitar terjadinya bencana.

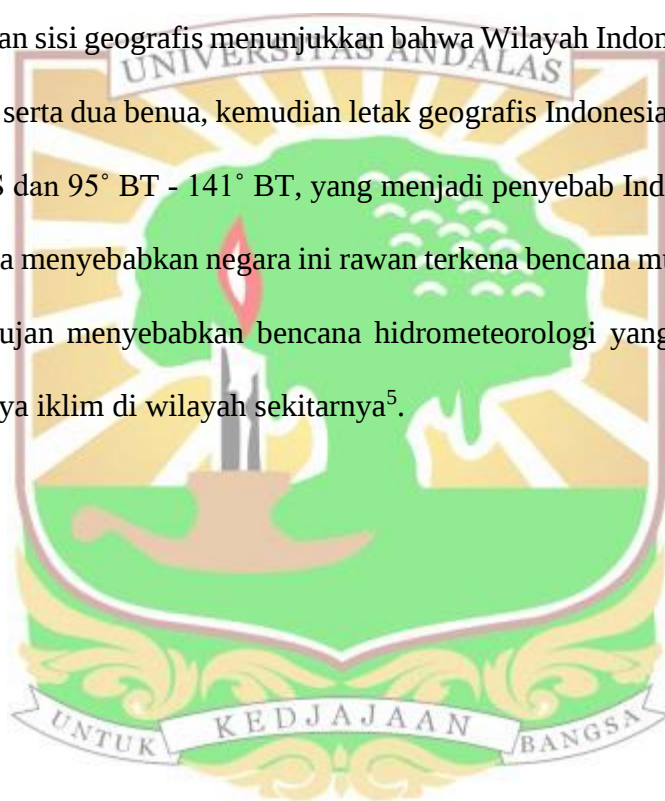
Kejadian ini diperkirakan dapat menghasilkan korban sekitar 45.000 jiwa di seluruh dunia pada setiap tahunnya, yang merupakan 0,1 % penyebab kematian di dunia. World Risk Report (WRR) 2024 dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia 2024 oleh BNPB menyatakan Indonesia merupakan negara dengan resiko bencana

¹ Setio Galih Marlyono and Gurniwan Kamil Pasya, "Peranan Literasi Informasi Bencana Terhadap," *Gea. Jurnal Pendidikan Geografi* 16 (2016): 116–23.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

tertinggi di dunia pada peringkat kedua dari 193 negara. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa hal yang berkaitan satu sama lain seperti karakteristik geografis dan geologi yang menyebabkan wilayah Indonesia sering terdampak bencana hidrometeorologi dan geologi³. Pada kondisi geologis Indonesia berada pada posisi empat lempeng utama yaitu Filipina, Eurasia, Pasifik, dan Indo Australia yang berdampak terhadap rawan terjadinya bencana seperti tsunami, gempa bumi serta letusan gunung berapi⁴.

Berdasarkan sisi geografis menunjukkan bahwa Wilayah Indonesia berada diantara dua samudera serta dua benua, kemudian letak geografis Indonesia berada di koordinat 6°LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT, yang menjadi penyebab Indonesia dengan iklim tropis sehingga menyebabkan negara ini rawan terkena bencana musiman, seperti pada saat musim hujan menyebabkan bencana hidrometeorologi yang sangat bergantung terhadap adanya iklim di wilayah sekitarnya⁵.



³ Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024*, Jakarta: BNPB, 2024.

⁴ *Ibid*, hlm. 15

⁵ Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, *Data Bencana Indonesia Tahun 2024*, Jakarta: BNPB, 2024. Ainun dkk. Rosyida, *Data Bencana Indonesia 2024* (Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, n.d.).

Tabel 1. 1
Bencana Alam Di Indonesia Tahun 2025

No.	Bencana	Kejadian
1.	Banjir	1525
2.	Cuaca Ekstrem	660
3.	Kebakaran Hutan dan Lahan	546
4.	Tanah Longsor	222
5.	Gelombang Pasang/ Abrasi	21
6.	Gempa Bumi	23
7.	Kekeringan	7
8.	Erupsi Gunung Api	6
9.	Tsunami	1
Jumlah Kejadian		3039

sumber: Geoportal Data Bencana Indonesia per 11 Desember 2025

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa terdapat 3.039 jumlah keseluruhan bencana pada negara Indonesia di Tahun 2025. Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2025, kejadian bencana yang rawan terjadi ialah banjir dengan jumlah 1525, selanjutnya cuaca ekstrim sebanyak 660, peristiwa kebakaran hutan dan lahan berjumlah 546, kemudian tanah longsor 222, gempa bumi sebanyak 23, Gelombang pasang sebanyak 21, kekeringan sebanyak 7, erupsi sebanyak 6 dan terakhir bencana alam Tsunami yang berjumlah 1. Dapat terlihat bahwa peristiwa bencana alam pada tahun 2025 di kebanyakan terjadi pada bencana hidrometeorologi yaitu sebanyak 2.960 kejadian dan bencana geologi sebanyak 79 kejadian

Bencana hidrometeorologi yang lebih dominan ini disebabkan oleh kondisi cuaca dan iklim pada negara ini di pengaruhi sejumlah penyebab yaitu tekanan udara yang terjadi secara tiba-tiba, serta musim kemarau/ hujan yang berkelanjutan menjadi faktor dari adanya bencana hidrometeorologi di Indonesia. Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada negara Indonesia dipengaruhi dengan adanya pergantian iklim. Iklim yang berganti menyebabkan kekeringan, permukaan air yang mengalami peningkatan aliran air dan erosi, kelebihan air dan berujung kepada terjadinya banjir dan longsor⁶.

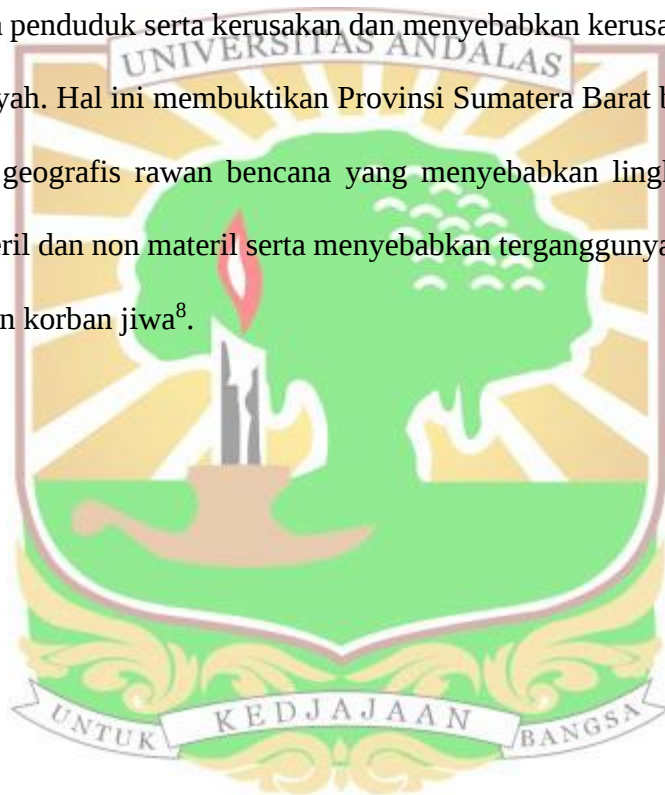
Berdasarkan geoportal data BNPB 2025 bencana alam yang terjadi menyebabkan korban jiwa sebanyak 1.422 jiwa meninggal dunia, 295 jiwa hilang, 5.900 jiwa luka-luka dan 10,5 juta jiwa. BNPB juga menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur berjumlah sebanyak 194.557 unit rumah dengan jumlah rusak ringan sebanyak 35.426 unit, kerusakan sedang 10.376 unit dan rusak berat sebanyak 148.686 unit kerusakan ringan. Terdapat juga kerusakan sebanyak 1.882 fasilitas publik seperti satuan pendidikan sebanyak 946 unit, rumah ibadah berjumlah unit dan fasilitas kesehatan sebanyak 269 unit terkena dampaknya. Dari banyaknya peristiwa bencana hidrometeorologi yang terjadi, bencana alam yang rawan terjadi di Indonesia ialah banjir. Bencana tersebut merupakan fenomena atau keadaan dimana air sungai meluap

⁶ M. A. Azizah, A. Subiyanto, S. Triutomo, dan D. Wahyuni, "Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Bencana Hidrometeorologi di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor," *PENDIPA Journal of Science Education*, Vol. 6, No. 2, 2022.

yang dipengaruhi beberapa faktor alamiah karena terjadinya kerusakan pada wilayah DAS yang menyebabkan kerugian material dan non material, adanya korban jiwa, kerusakan serta berdampak terhadap psikologis. Bencana ini dipengaruhi oleh terjadinya hujan, kerusakan DAS, adanya alur sungai yang dibangun dengan kurang tepatnya perencanaan pembangunan, kedangkalan sungai serta terjadinya kesalahan tata wilayah dan pembangunan fasilitas.

Permasalahan yang rawan terjadi di kota pada negara Indonesia ialah bencana banjir. Salah satu fenomena banjir terbesar yang banyak memakan korban jiwa ialah peristiwa banjir bahorok. Pada tahun 2003, Bukit lawang yang bertempat pada Kecamatan Bahorok mengalami banjir. Banjir yang terjadi ini memakan sebanyak 200 korban jiwa serta menyebabkan kerugian material pada daerah sekitarnya. Adanya kegiatan alih fungsi lahan pertanian, perusakan hutan secara ilegal serta kurangnya pengetahuan warga mengenai perlindungan awal banjir bandang menjadi penyebab banjir ini terjadi. Banjir yang terjadi diperkirakan merusak ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser yang berjumlah sekitar 22% atau 170.000 hektar. Sungai bahorok yang memiliki peran penting sebagai daerah aliran sungai Taman Nasional Gunung Leuser dengan Sejarah banjir yang pernah terjadi tidak menutup kemungkinan bahwa fenomena banjir ini dapat terjadi Kembali. Peristiwa banjir Kembali terjadi pada tahun 2015 di daerah Kecamatan Bahorok. Banjir yang terjadi tidak memakan korban akan tetapi tetap menyebabkan kerugian material berupa bangunan yang rusak di daerah sekitar⁷.

Bencana banjir dapat menyebabkan kerugian, yaitu: 1) daerah pemukiman yang tergenang, 2) rusaknya konstruksi, 3) menyebabkan longsor, 4) rusaknya wilayah pertanian dan perkebunan, serta 5) menimbulkan banyak penyakit. Salah satu provinsi yang sering terjadinya bencana ialah Sumatera Barat. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat menyatakan bahwa Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 10 Tahun telah terjadi 500 kejadian bencana yang mengakibatkan korban lebih dari 210.1000 jiwa penduduk serta kerusakan dan menyebabkan kerusakan dan kerugian di berbagai wilayah. Hal ini membuktikan Provinsi Sumatera Barat berada pada wilayah serta kondisi geografis rawan bencana yang menyebabkan lingkungan yang rusak, kerugian materil dan non materil serta menyebabkan terganggunya kondisi mental dan mengakibatkan korban jiwa⁸.



⁷ N. Ginting, N. P. Putra, "Mitigasi Bencana Banjir Kawasan Wisata Berkelanjutan (Studi Kasus: Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat)," *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2019).

⁸ Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Sumatera Barat

Tabel 1. 2
Bencana Alam Di Sumatera Barat 2014 – 2024

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
1	Banjir	1.370
2	Cuaca Ekstrem	4.654
3	Erupsi Gunung Api	56
4	Gelombang Pasang dan Abrasi	67
5	Karhutlan	710
6	Kekeringan	33
7	Tanah Longsor	1.613
Total		8.503

Sumber: Dokumen BNPB 2025

Tabel 1.2 berisikan data jumlah terjadinya bencana yang terjadi pada Provinsi Sumatera Barat Tahun pada tahun 2014 - 2024. Dari jumlah keseluruhan terdapat 8.503 kejadian bencana dalam jangka waktu 10 Tahun terakhir. Berdasarkan data, terlihat bahwa bencana hidrometeorologi mendominasi kejadian bencana yang terjadi di Sumatera Barat, khususnya cuaca ekstrem dengan jumlah 4.654 kejadian. Selanjutnya bencana tanah longsor sebanyak 1.613 kejadian bencana dan banjir dengan jumlah 1.370 kejadian. Melihat dari banyaknya kejadian bencana hidrometeorolgi di Provinsi Sumatera Barat ini disebabkan oleh karakteristik iklim dari wilayah tersebut.

Sumatera Barat merupakan wilayah dengan iklim tropika basah yang menjadikannya wilayah dengan curah hujan tinggi dengan jumlah 1.980 sampai 5000mm/ tahun. Tingginya intensitas curah hujan ini dapat menyebabkan bencana seperti banjir⁹.

Tabel 1. 3

Curah Hujan Kab/ Kota Sumatera Barat

No	Kabupaten/ Kota	Stasiun BMKG	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)
1.	Kab. Padang Pariaman	Stasiun Meteorologi Minangkabau	5.745,70	303
2.	Kab. Padang Pariaman	Stasiun Klimatologi Sumatera Barat	5.508,90	321
3.	Kota Padang	Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur	4.754,10	309
4.	Kota Padang Panjang	Stasiun Geofisika Padang Panjang	2.039,00	122

(Sumber : Statistik Indonesia 2025)

⁹ M. Arif, “Analisis Wilayah Berpotensi Banjir Daerah Sumatera Barat untuk Pelaksanaan Pembelajaran Geografi Berorientasi Bencana Alam,” *Jurnal Kepemimpinan dan Pengurusan Sekolah*, Vol. 4, No. 1 (2019)

Tabel 1.3 Merupakan data curah hujan di Kabupaten/ Kota Sumatera Barat. Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa Provinsi ini ialah wilayah yang memiliki intensitas curah hujan yang tinggi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap ibukota Provinsi Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Berdasarkan Data yang berasal dari Stasiun Meteorologi Maritim Teluk Bayur Menyatakan bahwa curah hujan di Kota Padang mencapai 4.754,10 mm/ Tahun dengan jumlah hari hujan yaitu sebanyak 309 hari. Berdasarkan data tersebut diketahui jumlah curah hujan serta frekuensi terjadinya hujan cukup tinggi di sepanjang tahun terjadi di Kota Padang. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya debit air sungai dan meningkatkan resiko banjir terutama pada daerah dengan dataran rendah serta daerah aliran sungai.

Kondisi geografis menunjukkan bahwa pada bagian pesisir pantai barat pulau Sumatera merupakan Kota Padang dengan luas keseluruhan yaitu 1.414,96 km² yang terbagi atas 694,96 km² luas daratan serta di dominasi oleh daerah perbukitan dengan luas 434,63 km² yang merupakan 60% dari bagian keseluruhan luas kota. Kota Padang memiliki beberapa aliran Sungai yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Dingin, daerah aliran sungai Air Timbalun, daerah aliran sungai Batang Kuranji, Daerah Aliran Sungai Batang Kandis, Daerah aliran sungai Pisang dan daerah Aliran sungai Batang Arau. Selain itu juga sebanyak 23 aliran sungai yaitu 10 Sungai besar dan 13 sungai kecil yang mengalir lainnya sepanjang 155,40 km yang pada umumnya ketinggiannya hampir sama dengan tinggi permukaan laut yang ada di Kota Padang¹⁰.

Selain itu, tingginya intensitas curah hujan dengan jumlah 405,58 mm disetiap bulannya atau sebanyak 17 hari di setiap bulan dapat menyebabkan beberapa lokasi di Kota Padang rentan terhadap banjir atau genangan. Banjir yang terjadi di Kota Padang disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan pada satu waktu dan mengakibatkan meningkatnya debit air sungai.

Di Kota Padang, salah satu kejadian bencana banjir terjadi pada ujung bulan November 2025, tepatnya tanggal 25-27 yang berdampak kepada 27.195 jiwa di enam kecamatan yaitu Kec. Padang Utara, Kec Nanggalo, Kec Koto Tengah, Kec Kuranji, Kec Lubuk Kilangan, Kec Pauh. Penyebab terjadinya bencana banjir di Kota Padang ialah meningkatnya volume air hujan yang berlebih. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kota Padang sebagai berikut:

“Banjir yang terjadi di Kota Padang pada bulan November ini disebabkan oleh volume air hujan yang luar biasa, air hujan yang turun tidak tertampung lagi di hulu sungai yang menyebabkan terjadinya banjir, juga diketahui kalau ada bukaan selain hutan didalam kawasan hutan yang buat daerah resapan air di hulu ini berkurang, dan sifat tanah nya ini memiliki karakteristik yang susah meresap ke dalam tanah dan akhirnya mengalir ke sungai tentu membuat volume air sungai meningkat.” (Wawancara dengan Al Banna S.Tr.IP selaku Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi pada 16 Januari 2026)

¹⁰ Wikipedia. *Geografi Kota Padang*. https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_Kota_Padang, diakses pada tanggal 27 Desember 2025, pukul 15. 40 WIB.

Hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa bencana banjir di Kota Padang pada bulan November Tahun 2025 disebabkan oleh curah hujan yang tinggi menjadi penyebab hulu sungai kelebihan volume air hujan sehingga tidak dapat menampung air yang turun. Selain itu diketahui bahwa terdapat daerah pada kawasan hutan yang dilakukan bukaan selain hutan yang menyebabkan daerah resapan air di hulu berkurang dan juga sifat tanah yang ada memiliki karakteristik yang susah meresap dan menyebabkan air tanah mengalir kedalam sungai dan menyebabkan volume air sungai meningkat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya banjir di Kota Padang.

Peristiwa banjir yang melanda Kota Padang bulan November Tahun 2025 tidak hanya menimbulkan genangan, namun ditemukan pada beberapa wilayah dengan karakteristik banjir bandang yang ditandai dengan derasnya aliran air secara mendadak disertai material lumpur dan lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur sekitar. Banjir bandang merupakan aliran air dengan tingkat kecepatan tinggi yang didalamnya berisikan elemen seperti pasir, kerikil, batu dan air serta material lainnya yang tergabung dalam satu kesatuan. Banjir bandang terjadi karena massa yang mengalir dengan kecepatan yang tinggi dan terus bertambah yang menyebabkan ketidak stabilan massa sedimen yang akhirnya menimbulkan banjir bandang¹¹.

¹¹ Lusi Utama, Afrizal Naumar, "Kajian Kerentanan Kawasan Berpotensi Banjir Bandang dan Mitigasi Bencana pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji Kota Padang," *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol. 9, No. 1 (2015), hal. 21–28.

“Banjir bandang yang terjadi di Kota Padang ini karena di atas hulu terdapat potongan kayu besar besar jadi ketika hujan dan hulu tidak mampu menampung air lagi, menyebabkan kayu besar tadi turun dan mengalir beserta sendimen lainnya, juga adanya kegiatan pertambangan di bagian hulu yang menyebabkan terjadinya banjir bandang ini” (Wawancara dengan Al Banna S.Tr.IP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kota Padang, pada 16 Januari 2026)

Kepala Seksi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang menyatakan bahwa banjir bandang terjadi dikarenakan tumpukan potongan kayu besar pada bagian hulu sungai dan ketika terjadi hujan dengan volume yang besar menyebabkan hulu tidak dapat menampung air dan air akhirnya meluap bersamaan dengan potongan kayu besar. Selain itu ditemukan keberadaan kegiatan dan usaha pertambangan di bagian hulu yang mengubah tutupan lahan menjadi bukaan lahan pertambangan dapat mempengaruhi laju aliran limpasan permukaan sungai.

Selain menimbulkan genangan, bencana banjir di Kota Padang tahun 2025 juga ditemukan pada beberapa wilayah dengan karakteristik banjir bandang yang ditandai dengan derasnya aliran air secara mendadak disertai material lumpur dan lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur sekitar. Bencana banjir yang melanda Kota Padang menyebabkan kerusakan infratraktur seperti jembatan dan banyak infrastruktur lainnya yang menyebabkan kerugian sebesar 202,8M. Selain itu juga ditemukan bahwa banjir yang terjadi menyebabkan 45 fasilitas pelayanan yang rusak yang terbagi atas 5 unit rumah ibadah,

37 unit satuan Pendidikan dan 3 unit kantor. Banjir yang terjadi juga menyebabkan kerusakan terhadap rumah sebanyak 5.497 unit. Banjir ini juga menyebabkan 2.912,16 ha sawah mengalami kekeringan dan 357 ha sawah yang mengalami puso (gagal panen) dikarenakan bendungan yang rusak menyebabkan air tidak bisa mengalir ke sawah seperti sebelumnya¹².

Tabel 1. 4
Kecamatan dan Jumlah Masyarakat Terdampak Banjir Kota Padang
Pada Bulan November Tahun 2025

No.	Kecamatan Terdampak	Jumlah Masyarakat terdampak
1.	Koto Tangah	20.983 Warga
2.	Nanggalo	2.232 Warga
3.	Padang Utara	1.486 Warga
4.	Lubuk Begalung	893 Warga
5.	Pauh	741 Warga
6.	Kuranji	601 Warga
7.	Padang Barat	321 Warga
8.	Padang Timur	150 Warga

Sumber : Data BPBD Tahun 2025

Tabel 1.4 berisikan kecamatan yang terdampak banjir pada bulan November Tahun 2025 di Kota Padang. Berdasarkan data tabel tersebut Kecamatan Koto Tangah merupakan Kecamatan dengan jumlah korban terbanyak yaitu sebanyak

¹² Dashboard Bencana Sumatera Barat. Incident Region Detail.
https://dashboardbencana.sumbarprov.go.id/incident-region-detail/138f0b15-d4d8-41fa-a8ab-822550bfd9f8?id_daerah=1371, diakses pada tanggal 27 Desember 2025, pukul 22.21 WIB.

20.983 warga, disusul Kecamatan selanjutnya ialah Kecamatan Nanggalo sebanyak Nanggalo sebanyak 2.232 Warga. Kemudian Kecamatan paling terdampak ketiga ialah Kecamatan Padang Utara dengan jumlah 1.486 warga, Kec. Lubuk Begalung dengan jumlah terdampak 893 warga, Kecamatan Pauh sebanyak 741 warga, Kecamatan Kuranji sebanyak 601 warga, Kecamatan Padang Barat sebanyak 321 warga dan terakhir ialah Kecamatan Padang Timur sebanyak 150 warga.

Salah satu Kecamatan Paling terdampak bencana banjir yang melanda Kota Padang ialah Kecamatan Pauh. Kecamatan Pauh ialah Kecamatan yang berada di bagian Barat serta Selatan Provinsi Sumatera Barat. Sebagai salah satu Kecamatan terluas, Pauh terbagi atas sembilan kelurahan yaitu Binuang Kampung Dalam, Cupak Tengah, Koto Luar, Lumau Manis Selatan dan Limau Manis, Pisang, Piai Tengah, Kapalo Koto, dan Lambung Bukit

“Kecamatan yang paling banyak kerusakannya itu di Kecamatan Pauh, infrastruktur banyak yang rusak seperti jembatan Gunuang Nago terus yang di Batu busuk itu juga sampai akses kesana putus total yang buat kita susah evakuasi dan menjangkau korban terdampak, jaringan irigasi dan bendungan Gunuang Nago juga jebol yang menyebabkan kekeringan di Kecamatan Pauh karena air tidak lagi mengalir kesawah dan sumur warga” (Wawancara dengan Al Banna S.Tr.IP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kota Padang, pada 16 Januari 2026)

Melalui hasil pernyataan wawancara diatas diketahui bahwa kecamatan Pauh mengalami kerusakan yang parah yang disebabkan oleh banjir yang melanda Kota Padang. Kerusakan di Kecamatan Pauh mencakup infrastruktur menyebabkan terhambatnya aktivitas warga serta menyebabkan kerugian.

Gambar 1. 1
Kondisi Jembatan Gunuang Nago



Sumber : ramadhan.antaranews.com

Gambar 1.2 merupakan kondisi bendungan Gunuang Nago yang mengalami kerusakan akibat banjir yang melanda Kecamatan Pauh. Banjir menyebabkan pendangkalan parah di Bendungan Gunuang Nago, kecamatan Pauh yang menyebabkan krisis air dan berdampak pada keringnya lahan pertanian dan sumur warga. Pemerintah Kota Padang melakukan Rapat Koordinasi Darurat dalam menyelesaikan permasalahan kekeringan yang terjadi akibat bencana yang diadakan di Gedung Putih, Rumah Dinas Wali Kota. Selanjutnya, Walikota Padang menyatakan bahwa kerusakan sumber air Gunuang Nago serta Sungai Batang kurangi menjadi penyebab terjadinya fenomena kekeringan di Kecamatan Pauh.

Walikota Padang mengharuskan ketepatan jadwal distribusi air kepada masyarakat yang berada di bawah satu komando guna menghindari tumpang tindih armada pengangkut air bersih yang dikomandoi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang dengan mengerahkan 13 unit armada yang dimiliki oleh instansi seperti Damkar, PMI, PU, dan BPBD yang dilakukan sebanyak 30 kali penyaluran air bersih kepada masyarakat disetiap harinya¹³.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, Pemerintah kota Padang menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana, dengan dikeluarkannya Keputusan Wali Kota Padang Nomor 795 tahun 2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor, yang menyatakan bahwa agar penyelenggaraan status tanggap darurat dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan pihak terkait, perlu dilakukan penetapan status tanggap darurat¹⁴. Pada Tanggal 25 November 2025 hingga 8 Desember 2025 ditetapkan Status tanggap darurat dan kemudian diperpanjang selama 7 hari pada tanggal 16 Desember 2025 hingga 22 Desember 2025 dilakukan perpanjangan status tanggap darurat kedua yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 842 Tahun 2025 Tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor.

¹³ Padang.go.id. (2025). *Krisis air di Padang: Ini kata Wali Kota Fadly Amran*. Diakses pada 1 Februari 2026 dari <https://padang.go.id/berita/krisis-air-di-padang-ini-kata-wali-kota-fadly-amran>

¹⁴ Keputusan Wali Kota Padang Nomor 795 Tahun 2025 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor.

Dalam dokumen terdapat 5 aspek yang perlu dilakukan yaitu mengenai pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dilanjut dengan pemenuhan kebutuhan dasar, menyediakan tempat tinggal sementara, perlindungan warga dengan kondisi rentan dan yang terakhir ialah pemulihan darurat sarana prasarana utama. Setelah fase tanggap darurat berakhir, selanjutnya masuk pada tahap pemulihan yang dimana merupakan fase rehabilitasi dan rekontruksi. Bencana banjir yang melanda Kota Padang Bulan November Tahun 2025 menyebabkan kerusakan dan kerugian yang cukup besar. Maka, pemerintah Kota Padang harus melakukan manajemen pasca bencana banjir agar roda kehidupan masyarakat dapat berjalan seperti sebelum terjadinya bencana.

Menurut UU No. 24 Tahun 2007. Rehabilitasi adalah tindakan perbaikan dan pengembalian layanan publik ke tingkat yang memadai di wilayah pascabencana, bertujuan menormalisasi seluruh aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat¹⁵. Sementara menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa rekontruksi merupakan perumusan kebijakan dan proses nyata secara terstruktur, tetap dan konsisten dalam membangun seluruh prasarana ataupun sarana dan sistem kelembagaan untuk membangun Kembali kegiatan perekonomian, sosial dan budaya di wilayah terdampak pasca bencana¹⁶.

¹⁵ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

¹⁶ Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Pada fase pemulihan, peran pemerintah yaitu sebagai pengarah dan pengendali dalam proses pemulihan agar dapat proses pemulihan pasca bencana dapat berjalan secara efektif. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 5 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2023 menyatakan bahwa salah satu Wewenang Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana yaitu menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Pemerintah dalam menanggulangi bencana wajib membentuk Lembaga penanggulangan bencana, hal ini sesuai yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 35 dan 36. Berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk sebagai subsistem kelembagaan pada tingkat daerah, yang bertugas dalam melakukan upaya penanggulangan bencana berdasarkan jenis dan keperluan pada setiap daerah dengan tanggung jawab mengkoordinasi sektor ataupun lembaga lokal terkait agar pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif. Dengan adanya BPBD maka terbentuklah struktur yang tepat dan teratur pada tiap rangkaian penanggulangan bencana yaitu tahap mitigasi hingga tahap pemulihan bencana.

Pemerintah Kota Padang melalui BPBD memiliki posisi sebagai *leading sector* dalam memberi arahan, melakukan koordinasi, serta memastikan proses penanggulangan bencana, khususnya pada fase pemulihan agar dapat berjalan secara efektif.

“Setelah bencana terjadi kami menurunkan tim ke lapangan secara teknis yang mana tim tersebut mendata kondisi penduduk dengan tingkat kerugian yang terjadi, BPBD mulai mengerahkan, dinas PUPR, Pertanian, BWS dan segala dinas yang terkait dengan kerusakan yang terjadi. Kami juga bekerja sama dengan Kantor Kecamatan Pauh dalam mendata korban terdampak dan juga Dinas Sosial sebagai penyaluran bantuan kepada korban terdampak” (Wawancara dengan Hendri Zulvito, S.T., M.T selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, pada 21 April 2026)

Melalui hasil pernyataan wawancara dengan Kalaksa BPBD Kota Padang, BPBD sebagai *leading sector* melakukan koordinasi dengan beberapa dinas terkait dalam melakukan pendataan mengenai kerusakan yang di akibatkan oleh banjir yang terjadi. Dalam melakukan pendataan BPBD bekerja sama dengan dinas PUPR dalam mendata kerusakan infrastruktur, Dinas Pertanian dalam mendata jumlah kerusakan lahan pertanian akibat banjir serta BWS (Balai Wilayah Sungai) dalam mendata kerusakan saluran irigasi akibat banjir yang terjadi, BPBD Kota Padang juga berkoordinasi dengan Kantor Camat Pauh serta Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan terhadap korban terdampak bencana.

“setelah banjir terjadi kami membuat pengungsian masyarakat, ada yang ditenda, ada beberapa tempat seperti masjid, mushola dan dilakukan upaya pemindahan

masyarakat ke HUNTARA, dan juga melalui koordinasi dengan dinsos bersama kami penuhi kebutuhan mereka seperti basic hidup ya itu pangan, papan, sandang dipenuhi. Mereka juga kami lakukan upaya Pembangunan mental melalui sejumlah tim psikolog seperti dari unand dengan program program trauma healing, gerakan gerakan yang membuat mereka itu termotivasi untuk sempat bangkit.” (Wawancara dengan Hendri Zulvito, S.T., M.T selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, pada 21 April 2026)

Melalui hasil pernyataan wawancara dengan Kalaksa BPBD Kota Padang, diketahui bahwa setelah banjir yang terjadi BPBD dan dinas lainnya mulai membuat tempat pengungsian darurat dengan mendirikan beberapa tenda sebagai tempat sementara bagi korban bencana banjir. BPBD juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup sementara seperti sandang dan pangan, dan juga dilakukan *Trauma Healing* bagi korban bencana melalui beberapa program terkait yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Padang melalui koordinasi dengan Tim Psikolog Universitas Andalas.

Namun, dalam melakukan proses pemindahan masyarakat terdampak ke Huntara (Hunian Sementara) Pemerintah Kota Padang menghadapi kesulitan yang disebabkan masih banyak ditemukannya masyarakat Kecamatan Pauh yang tidak ingin meninggalkan rumah tempat tinggal mereka sebelumnya.

“Salah satu tantangan kami itu banyak masyarakat yang gak mau ninggalin rumahnya karena mungkin udah nyaman dengan lingkungan dan kondisi tempat tinggal mereka, bahkan walaupun rumahnya udah hancur pun masih di bangun ulang sama mereka di tempat itu lagi di red zone

nanti ujung- ujung nya kalau kena bencana nyalahin pemerintah lagi padahal kami udah ngasi Solusi kepada bapak ibuk dengan dibangunnya Huntara dan Huntap buat tempat tinggal mereka” (Wawancara dengan Zulfitri, S.T selaku Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang, pada 21 April 2026)

Melalui hasil pernyataan wawancara diatas diketahui bahwa Pemerintah Kota padang masih memiliki tantangan dalam proses pemulihan pascabencana yang ditandai dengan banyak masyarakat yang sulit untuk dilakukan relokasi ke Huntara dan Huntap. Diketahui bahwa banyak masyarakat yang memilih tinggal dan menetap serta melakukan pembangunan ulang di lokasi rumah tempat tinggal sebelumnya. Sulitnya dilakukan pemindahan kepada masyarakat disebabkan oleh banyak masyarakat yang tidak ingin meninggalkan rumah mereka dikarenakan lokasi yang sudah nyaman dengan lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya.

“Kalau Tentang Pembangunan infrastruktur boleh dikatakan semacam fasos kami upayakan dalam bentuk rehabilitasi sementara dulu, jembatan rusak kami perbaiki dulu yang penting bisa dilalui dulu, terdapat irigasi yang rusak sehingga butuh sumber air baru itu dibuat sumur bor di beberapa tempat tertentu. Mengatasi kekeringan di Kecamatan Pauh dilakukan dengan kerjasama dengan instansi seperti PUPR, kita suplai air untuk masyarakat. Untuk perbaikan irigasi dan jalan rusak disekitaran sungai kita bekerjasama dengan Balai Wilayah Sungai dan dinas PU seperti di Batu Busuk yang kemarin terisolir dan sampai sekarang tidak terisolir lagi” (Wawancara dengan Hendri Zulviton, S.T., M.T selaku Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, pada 21 April 2026)

Melalui hasil pernyataan wawancara diatas bahwa dalam proses pemulihan infrastruktur tahap awal dilakukan rehabilitasi. Setelah terjadinya banjir, masyarakat mengalami kekeringan yang diakibatkan kerusakan irigasi dan hulu sungai.

Salah satu kecamatan yang sampai saat ini masih mengalami kekeringan yaitu Kecamatan Pauh, dan dalam mengatasi kekeringan yang terjadi pasca bencana banjir, BPBD melakukan pengeboran sumur serta mengerahkan bantuan suplai air bersih kepada masyarakat melalui koordinasi dengan Dinas PUPR Kota Padang yang dilakukan secara berkala di beberapa wilayah yang mengalami kekeringan serta mengkoordinasikan BWS (Badan Wilayah Sungai) untuk melakukan perbaikan kerusakan yang terjadi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2025 Pasal 21 menyatakan bahwa pada fase pemulihan yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan penanganan segera, dengan dibentuknya tim kelompok penanganan pascabencana sesuai dengan tingkatan bencana yang terjadi. Pemerintah Kota Padang melalui BPBD sebagai leading sector memiliki peran dalam membuat kebijakan serta mengkoordinasikan instansi terkait dalam fase pemulihan pasca bencana banjir yang terjadi.

Namun, pada proses pemulihan pasca bencana oleh Pemerintah Kota Padang masih belum berjalan secara maksimal. Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Banjir, Banjir Bandang, Tanah Longsor Dan Angin Kencang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026-2028 yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat NOMOR : 360 – 17 -2026 yang digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada wilayah terdampak dalam kegiatan pemulihan pascabencana alam banjir bandang, banjir, longsor dan angin kencang di Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2026-2028 menyatakan bahwa dalam setiap penanggulangan bencana dilakukan perencanaan dengan tujuan setiap tahapan pada proses penanggulangan bencana dapat berjalan secara lebih terstruktur. Maka, sasaran substansial Rehabilitasi dan Rekonstruksi terbagi kedalam enam aspek, yaitu ; (1) Aspek Kemanusiaan; (2) Aspek perumahan dan permukiman; (3) Aspek Infrastruktur; (4) Aspek ekonomi; (5) Aspek Sosial; (6) Aspek lintas sektor.

Namun demikian, dalam proses pemulihan tidak semua aspek terlaksana dengan baik. Pada aspek kemanusiaan masih ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang kondisi mentalnya masih terganggu akibat dari banjir yang terjadi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu warga Kecamatan Pauh.

“saya ga sanggup liat air besar menghantam tembok, bawa seng, rendam mobil terus nengok orang hanyut depan mata, sekarang udah pindah dari sana karena ga kuat mental. Inipun saya masih trauma, masih belum berani dengar suara air keras, kepala saya jadi sakit apalagi kalau hujan jantung saya masih deg- deg an, bencana emang ninggalin trauma tapi ga semua orang paham, susah kuatnya apalagi buat pulih” (Wawancara dengan Ongga (60), salah satu warga di Kecamatan Pauh, Kota Padang pada 21 Januari 2026)

Melalui hasil pernyataan wawancara oleh salah satu warga terdampak banjir pada Kecamatan Pauh membuktikan bahwa pada aspek kemanusiaan, proses pemulihan tidak berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan masih adanya masyarakat yang mengalami trauma pasca bencana banjir. Maka dari itu, Penting bagi peneliti untuk melihat strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Padang agar proses pemulihan dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya pada proses pemulihan tentu dilakukan pendataan awal sebagai penentu prioritas pemulihan pasca bencana banjir. Indriasari, dkk (2015) menyatakan data merupakan salah satu hal yang ketika terjadinya bencana sehingga proses penanggulangan bencana berjalan secara efektif, cepat dan akurat serta dapat dikelola dengan baik oleh instansi terkait¹⁷. Pada fase pemulihan, koordinasi merupakan salah satu aspek penting untuk memastikan agar setiap instansi atau lembaga terkait dapat menjalankan TUPOKSI nya secara efektif¹⁸. Pada pemerintahan daerah koordinasi dilakukan dengan adanya komunikasi antar instansi, selain itu dilakukannya pengendalian dan pengorganisasian oleh kepala daerah sebagai pemegang wewenang. Dengan dilakukannya koordinasi yang terarah, implementasi pada fase pemulihan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan staff dari bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi menyatakan bahwa masih banyak ditemukan pendataan dilakukan oleh oknum yang kurang memiliki keterampilan mengenai alur pendataan Berikut merupakan hasil wawancara:

“Kalau dilapangan itu, masih banyak data yang ga sesuai sama yang dilaporkan. Jadi aparat di bawah itu nggak ngerti tentang pendataan. Jadi kadang-kadang yang diminta yang rusak perumahan, dia bikin untuk datanya yang dapat beras.”
(Wawancara dengan Zulfitri, S.T selaku Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Padang, pada 19 Januari 2026).

¹⁷ Indriasari, T. D., Anindito, K., & Julianto, E. (2015). Analisis dan Perancangan Sistem Pengumpulan Data Bencana Alam. *Jurnal Buana Informatika*, 6(1), 63-72.

¹⁸ Wahyudi, B., Muradi, M., & Yuningsih, N. Y. (2024). Koordinasi Pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 845-858.

Hasil pernyataan wawancara diatas menunjukkan bahwa dalam proses pendataan sebagai langkah awal pemulihan masih ditemukan bahwa aparat yang melakukan pendataan masih sering belum mengetahui bagaimana mekanisme pendataan sesuai dengan kebutuhan korban terdampak yang menyebabkan data tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Selain itu pada saat koordinasi masih sering ditemukan permasalahan tumpang tindih data, berikut merupakan hasil wawancara:

“Terkait koordinasi itu sering ada tumpang tindih data Jadi pada posko utama, laporannya biasanya beda yang buat kita bingung mana data yang harusnya diambil, dan ada beberapa proses pendataan yang dilakukan tidak sesuai dengan jobdesc masing- masing padahal mereka ga punya pengetahuan lebih untuk mengetahui kerusakan” (Wawancara dengan pegawai bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Kota Padang pada 19 Januari 2026)

Hasil pernyataan wawancara diatas menunjukkan bahwa pada proses pemulihan pasca bencana, koordinasi yang dilakukan masih belum jelas alurnya yang menyebabkan data yang didapatkan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Terjadinya tumpang tindih data, ketidaksesuaian data antarlevel pemerintahan, perubahan data saat proses validasi, serta keterbatasan ketepatan data di tingkat bawah menyebabkan validasi data dilakukan secara berulang kali, sehingga memperlambat proses penyusunan rencana pemulihan. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh OPD terkait masih belum terjalin dengan baik.

Sesuai dengan observasi awal, peneliti menemukan sejumlah masalah yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam menjalankan proses pemulihan, dibuktikan

dengan sulitnya dilakukan relokasi masyarakat ke Huntara dan Huntap yang menyebabkan sulit dalam melakukan pemulihan secara efektif, selain itu peneliti menemukan bahwa pemulihan pasca bencana tidak memenuhi 6 aspek yang sesuai dengan Peraturan BNPB Nomor 11 Tahun 2008 Upaya dalam rehabilitasi dan rekontruksi yang menjadi panduan dalam melakukan pemulihan pasca bencana. Selain itu dalam proses pendataan awal dilakukan oleh oknum yang tidak memiliki keterampilan mengenai mekanisme pendataan, selain itu dalam masih ditemukan kendala dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain seperti terjadinya tumpang tindih data yang menyebabkan sulitnya penentuan prioritas proses pemulihan bencana banjir yang terjadi.

Maka, untuk mengetahui bagaimana strategi dalam proses pemulihan pasca bencana banjir oleh Pemerintah Kota Padang peneliti menggunakan teori strategi oleh Richard, P Rumelt. Peneliti menggunakan teori ini karena fenomena teoritis yang diperoleh oleh peneliti relevan dengan ide strategis yang dinyatakan oleh Richard, P Rumelt. Penulis berpendapat bahwa dalam proses pemulihan pasca bencana banjir Kota Padang memerlukan strategi yang baik yang dimulai dari proses diagnosis, kebijakan penuntun dan Tindakan koheren dalam proses implementasi strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam pemulihan pasca bencana dapat membantu berbagai tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana “Strategi Pemerintah Kota Padang Pada Fase Pemulihan Pasca Bencana Banjir Kota Padang Tahun 2025”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana strategi Pemerintah Kota Padang pada fase pemulihan pasca bencana banjir Kota Padang Tahun 2025?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mendeskripsikan strategi Pemerintah Kota Padang pada fase pemulihan asca bencana banjir Kota Padang Tahun 2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Selaras dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berguna dalam memberikan kontribusi pada pengembangan keilmuan administrasi publik, karena penelitian ini mencakup beberapa kajian Administrasi Publik di konsentrasi manajemen publik khususnya tentang strategi. Dengan demikian, peneliti berharap bisa memberikan pengetahuan tambahan serta wawasan kepada mahasiswa Administrasi Publik lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa membantu semua pihak, khususnya bagi Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan Strategi dalam Proses Pemulihan Pasca Bencana Banjir. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan dan acuan terhadap upaya Pemulihan kepada Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pemulihan bencana banjir.

